

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi seperti digitalisasi dan internet memungkinkan penggunaannya untuk mengakses informasi secara mudah, sayangnya tidak semua orang dapat memanfaatkan hal ini secara positif dan bertanggung jawab. Menurut Putri (2020, p. 91), Internet adalah sebuah tempat untuk mencari dan memanipulasi informasi yang sudah ada serta menciptakan dan menyebarkan informasi baru. Akibatnya, pengguna internet dapat terpapar informasi apa pun, baik yang berguna maupun tidak. Untuk dapat memanfaatkan penggunaan internet sebagai sumber informasi secara maksimal, diperlukan kebijakan dan kemampuan dalam mengakses, memilah, serta menggunakan informasi yang didapatkan, baik secara langsung melalui internet maupun orang lain. Kemampuan ini merupakan bagian penting dari literasi (Breivik & Gee dalam Angeley & Purdue, 2000, p. 2). Dalam arti lain, setiap orang perlu memiliki kemampuan literasi yang baik agar dapat mengolah informasi dengan tepat. Literasi sering didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Nyatanya, definisi literasi juga mencakup proses pemahaman seseorang dalam mengolah dan menginterpretasikan informasi untuk ditempatkan/dikategorikan dalam sebuah konteks tertentu (Angeley & Purdue, 2000, p. 1).

Michael Holzman (dalam Angeley & Purdue, 2000, p. 1) menjelaskan adanya dua model literasi, yaitu literasi nominal dan literasi aktif. Literasi nominal adalah kemampuan seseorang memahami huruf dan abjad dalam membaca dan menulis, sedangkan literasi aktif adalah sebuah ‘bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari’. Maksud dari ‘bagian tidak

terpisahkan' yang dijelaskan Holzman adalah kemampuan berpikir kritis yang diperlukan ketika mengolah informasi. Berpikir kritis adalah sebuah keterampilan kognitif yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan solusi yang praktis dan jujur (Al-Shawarti dalam Zou'bi, 2021, p. 2). Inilah yang menjadi alasan literasi aktif dikatakan sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari, berbeda dengan literasi nominal yang dinilai sebagai bagian dari pendidikan mendasar. Menurut Zou'bi (2021, p. 2), literasi dinilai sebagai kualifikasi wajib yang diperlukan di dunia digital. Kemampuan ini dapat membangun kesadaran bermedia dan menghindari informasi menyesatkan, dengan begitu seseorang akan memiliki kontrol lebih besar atas interpretasi informasi yang dikonstruksi media atau masyarakat (Zou'bi, 2021, p. 2; Suryatni, 2014, p. 69).

Di Indonesia sendiri, tingkat literasi masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Berdasarkan survei literasi tahun 2019 milik Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), literasi masyarakat Indonesia menempati peringkat 62 dari 70 negara. Survei ini dinilai berdasarkan kemampuan matematika, sains, dan membaca masyarakat yang berusia di atas 15 tahun. Sementara itu, dalam survei lainnya oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Indonesia, skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Indonesia masuk dalam kategori sedang di angka 64,48 dari 100 pada 2022 (Data Indonesia, 2023). Hasil ini tidak berbeda jauh dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Indonesia. Status Literasi Digital Indonesia tahun 2022 mencatat literasi digital masyarakat Indonesia berada di angka 3,54 dari 5, tingkat literasi digital ini juga masuk dalam kategori sedang (Kominfo, 2023).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi adalah dengan menambah wawasan. Mengakses informasi dari sumber yang berbeda-beda berperan dalam mengasah kemampuan berpikir kritis. Kovach & Rosenstiel (dalam Suryatni, 2014, p. 67) mengungkapkan bahaya dari tidak

menggunakan pemikiran kritis ketika memeriksa informasi, seseorang akan mudah tersesat dalam informasi dan mengonsumsi informasi tanpa pikir panjang. Namun, seperti bagaimana berita dapat ditemukan dan dikonsumsi kapan saja, berita juga dapat dihindari kapan dan dimana saja (Villi et al., 2022, p. 1). Meski ketersediaan berita sudah semakin banyak, jumlah orang yang menghindari berita juga semakin banyak (Blekesaune et al., 2012; Strömbäck et al., 2013 dalam Skovsgaard & Andersen, 2019, p. 1). Banyaknya informasi di internet tidak menjamin seseorang akan mengonsumsi berita tersebut (Nelson & Kim, 2021, p. 4). Sebaliknya, Toff & Kalogeropoulos (2020, p. 4) menemukan adanya keleluasaan bagi seseorang untuk memilih dan menghindari jenis berita tertentu karena banyaknya pilihan berita yang ada. Menurut Tian (2022, p. 4), terlalu banyak informasi tentu akan mengarah pada perilaku menghindar.

Dalam kajian media, perilaku menghindar ini dikenal dengan istilah *news avoidance*. *News avoidance* adalah keadaan saat seseorang dengan sengaja maupun tidak sengaja menghindari atau menolak pemberitaan (Villi et al., 2022, p. 2). Skovsgaard & Andersen (2019, p. 2) menjelaskan lebih lanjut perbedaan antara perilaku *news avoidance* yang disengaja dan tidak disengaja. Seseorang akan dengan sengaja menghindari berita jika tidak menyukai genre berita tertentu, seperti pemberitaan yang terlalu negatif, rendahnya kepercayaan terhadap berita tersebut, maupun luapan informasi yang terlalu banyak di waktu yang bersamaan. Sementara itu, perilaku menghindar berita yang tidak disengaja biasanya dikarenakan meningkatnya pilihan media dan preferensi konten berita. Banyaknya pilihan memudahkan audiens untuk mengonsumsi genre berita yang sesuai dengan keinginannya, keputusan ini secara tidak langsung membuat audiens melakukan *news avoidance* secara tidak disengaja. Selain faktor-faktor ini, Villi et al. (2022, p. 4) juga menambahkan budaya sebagai salah satu faktor lainnya yang memengaruhi orang melakukan *news avoidance*. Penelitian lainnya juga menunjukkan usia, kelas ekonomi, dan jenis kelamin memiliki pengaruh

terhadap perilaku *news avoidance* (Aharoni et al., 2021; Damstra et al., 2023; Gorski, 2023).

Selaras dengan Skovsgaard & Andersen, Schäfer et al. (2022) juga menemukan faktor-faktor pengaruh perilaku *news avoidance* yang serupa, yakni kepercayaan media, perilaku politik, dan reaksi emosional (*emotional distress*) yang memiliki pengaruh terhadap perilaku *news avoidance*. Aharoni et al. (2021) menjelaskan, faktor kepercayaan media atau berita ini muncul akibat perspektif audiens terhadap kualitas media/jurnalisme yang kian hari semakin menurun (pp. 8–9). Generasi muda mengaku merasa kesal dengan banyaknya iklan yang muncul ketika siaran berlangsung, entah itu iklan dengan propaganda ekonomi/bisnis maupun politik. Selain iklan, kepercayaan generasi muda terhadap media juga menurun disebabkan banyaknya judul-judul *clickbait* dalam portal berita sehingga membuat audiens merasa dibohongi (Aharoni et al., 2021, p. 9).

Selain kepercayaan media, penelitian juga mencatat reaksi emosional sebagai salah satu faktor utama yang mendorong audiens dalam melakukan *news avoidance*. Reaksi emosional, yang juga disebut *emotional distress* oleh Schäfer et al. (2022), menjadi salah satu faktor pendorong *news avoidance* yang banyak diungkit dalam kajian media. Aharoni et al. (2021, p. 9) menjelaskan, *emotional distress* yang dialami audiens akibat pemberitaan dapat terjadi hanya karena pemberitaan memiliki konotasi yang negatif, entah isi dari berita itu sendiri maupun adanya bias. Penelitian lainnya oleh Villi et al. (2022) dan Skovsgaard & Andersen (2019) menemukan alasan lainnya generasi muda menghindari berita ditimbulkan oleh rasa cemas dan kelelahan akibat banyaknya informasi atau pemberitaan yang beredar di saat yang bersamaan. Seperti dalam beberapa tahun belakangan, penelitian menunjukkan meningkatnya perilaku *news avoidance* yang diakibatkan *emotional distress* berupa rasa cemas (*anxiety*) dan kelelahan (*overload*) dari pemberitaan pandemi Covid-19 saja. Padahal, di era digitalisasi saat ini, luapan informasi tidak dapat dihindari.

Aksi menghindari berita tidak memiliki durasi waktu tertentu, seseorang bisa saja menghindari berita dalam interval waktu tertentu, sementara, maupun setelah melalui proses selektif tertentu. *News avoidance* dinilai sebagai tingkah laku sementara dan tidak permanen (Portwood-Stacer 2013; Ribak and Rosenthal 2015; Woodstock 2014b dalam Villi et al., 2022, p. 3). Bahkan, Toff & Kalogeropoulos (2020, p.3) menemukan adanya kemungkinan penggemar berita untuk melakukan *news avoidance* secara rutin dari waktu ke waktu. Walaupun tidak bersifat permanen dan wajar dilakukan, perilaku menghindari berita tetap memiliki dampak negatif. Studi menunjukkan, literasi media memiliki dampak positif terhadap motivasi mencari berita audiens (Tian, 2022, p.5). Jika audiens memiliki literasi media yang rendah akibat perilaku *news avoidance*, maka audiens juga memiliki motivasi mencari berita yang rendah juga.

Dalam konteks politik, keadaan ini merupakan hal yang berbahaya. Audiens yang melakukan *news avoidance* juga akan memiliki motivasi untuk mencari berita politik yang rendah. Padahal, Fitriani et al. (2022, p. 47) menjelaskan, literasi politik yang baik membuat seseorang mampu menentukan pilihan politiknya sendiri. Literasi politik berperan dalam memilah informasi yang diterima sebagai bahan pertimbangan ketika menentukan pilihan politiknya. Habermas (1989) menulis, untuk mengakses informasi politik, seseorang juga bisa mengakses berita sebagai salah satu rantai penghubung paling signifikan dengan segala informasi berbau politik di ruang publik (dalam Toff & Kalogeropoulos, 2020, p. 2).

Kurangnya literasi di Indonesia tidak hanya berdampak pada kemampuan mengolah informasi dan proses belajar, tetapi juga kelangsungan demokrasi negara (Association of College and Research Libraries (ACRL) dalam Angeley & Purdue, 2000, p.3; Limilia & Fuady, 2021, p. 43). Penelitian Limilia & Fuady (2021) mengungkapkan adanya hubungan antara tingkat literasi media dan partisipasi politik remaja, semakin tinggi keterampilan literasi, semakin tinggi pula partisipasi politiknya. Hubungan keduanya

terletak pada keterampilan berpikir kritis dan cerdas dalam memilih informasi dengan sumber yang jelas. Keterampilan inilah yang menimbulkan sikap ingin tahu dan kritis dalam mempertanyakan segala sesuatu, termasuk permasalahan politik. Nantinya, pemikiran kritis dapat dijadikan sebagai landasan untuk meningkatkan partisipasi politik atau demokrasi (Suryatni, 2014, p. 67; Limilia & Fuady, 2021, p. 43). Hubungan antara tingkat literasi dengan praktik demokrasi juga diperkuat pernyataan Cassel & Lo (1997) yang menyatakan bahwa literasi politik adalah pilar utama dari teori empiris demokrasi (p. 317).

Literasi politik memiliki definisi yang luas. Bochel (2009, p. 151) mendefinisikan literasi politik sebagai kemampuan memberikan pendapat dan menggunakan hak serta tanggung jawab sebagai warga negara, bukan mendeskripsikan atau menganalisa keadaan politik. Zaller (1992, p. 21) mendefinisikan literasi politik dengan sebutan “*political awareness*” yang berarti sejauh mana seseorang memperhatikan dan mengerti politik. Fitriani et al. (2022, p. 47) menjelaskan literasi politik sebagai kondisi seorang warga negara dapat menggunakan partisipasi politiknya secara lebih berkualitas, tidak hanya sekadar menggunakan hak suaranya. Terlepas definisinya yang luas dan berbeda-beda, literasi politik dan literasi informasi terikat satu sama lain dan tidak mungkin dipisahkan (Alexander, 2009, p. 11). Selain literasi politik, konsep ini juga dikenal sebagai “keahlian berpolitik” dan “kompetensi kewarganegaraan” (Krosnick & Strate et al. dalam Cassel & Lo, 1997, p. 321).

Memahami dan memiliki kesadaran politik penting dimiliki oleh setiap warga negara karena memiliki dampak pada kualitas politik sebuah negara (Lailiyah et al., 2020). Namun, beberapa penelitian justru menunjukkan rendahnya literasi, minat, dan partisipasi politik masyarakat, khususnya masyarakat berusia muda (Alexander, 2009; Fitriani et al., 2022; Lailiyah et al., 2020). Prasetyo et al. (2022) mengungkapkan salah satu alasan di balik masalah ini adalah kebanyakan anak muda yang merasa pendapatnya dalam

politik tidak didengarkan dan lebih dianggap sebagai objek daripada subjek politik, perlakuan ini lalu mendorong generasi muda menjadi tidak peduli politik (dalam Fitriani et al., 2022, p. 52). Masalah ini perlu diatasi agar literasi politik juga dapat meningkat, mengingat literasi politik memegang peranan penting dalam perubahan arah demokrasi yang lebih partisipatif dan adanya kemungkinan peningkatan perkembangan individu yang akan berkontribusi dalam masyarakat (Bochel, 2009, pp. 151–152). Salah satu upaya lainnya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat adalah dengan mengakses informasi-informasi politik.

Studi terdahulu menunjukkan urgensi perilaku *news avoidance* yang perlu diatasi, khususnya dalam konteks politik, karena memiliki dampak negatif pada kelangsungan demokrasi sebuah negara. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh positif paparan berita sebagai salah satu sumber mempelajari politik terhadap literasi dan partisipasi politik (Gil de Zúñiga & Diehl, 2019, p.108; Skovsgaard & Andersen, 2019, p. 1). Blekesaune et al. (2012) juga menemukan adanya dampak negatif pada pengetahuan dan partisipasi politik seseorang yang diakibatkan perilaku menghindari berita (dalam Villi et al., 2022, p. 4). Sunstein (2001) menjelaskan, urgensi ini disebabkan oleh audiens yang memiliki pilihan untuk memilih genre berita lainnya sehingga menurunkan kemungkinan audiens untuk mengolah informasi yang bertentangan dengan sudut pandangnya. Hasilnya, perilaku *news avoidance* terhadap berita politik yang dilakukan audiens memengaruhi demokrasi negara (dalam Prior, 2005, p. 577). Di sisi lain, Tian (2022, p. 4) juga mengungkapkan tingkat literasi yang rendah akan menyulitkan seseorang dalam memahami informasi sehingga mendorong perilaku *news avoidance*. Di saat yang bersamaan, penelitian lainnya juga menunjukkan berita dibutuhkan sebagai sumber informasi untuk mengasah dan meningkatkan tingkat literasi. Kontradiksi ini lantas memunculkan sebuah pertanyaan, apakah masyarakat menghindari berita politik karena tingkat literasi

politik yang rendah atau tingkat literasi politik masyarakat rendah karena menghindari berita politik?

Menjelang Pemilu 2024, informasi tentang politik akan semakin mudah ditemukan, tetapi hal ini tidak menjamin peningkatan tingkat konsumsinya. Sebaliknya, berdasarkan penemuan Nelson & Kim (2021), Tian (2022), dan Toff & Kalogeropoulos (2020), banyaknya informasi yang beredar justru meningkatkan kemungkinan dilakukannya *news avoidance*. Dengan beberapa penelitian yang menunjukkan rendahnya tingkat literasi, minat dan partisipasi politik, serta perilaku *news avoidance*, menarik untuk meneliti adakah pengaruh literasi politik terhadap perilaku *news avoidance* di kalangan generasi muda. Selain itu, peneliti juga akan menambahkan pengaruh kepercayaan media dan *emotional distress* terhadap perilaku *news avoidance* untuk melengkapi penelitian terdahulu. Generasi muda dipilih karena dikatakan sebagai generasi yang memiliki minat politik yang rendah (Prasetyo et al., 2022; Fitriani et al., 2022; Lailiyah et al., 2020). Beberapa di antara mereka juga mungkin akan menggunakan hak suaranya untuk yang pertama kali pada Pemilu 2024 mendatang, menjadikan literasi politik sebagai kemampuan penting agar dapat kritis dalam memilih wakil rakyat. Oleh karenanya menjadi penting untuk memahami bagaimana perilaku generasi muda terkait berita politik di Indonesia menjelang pemilu 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah melihat apakah literasi politik, kepercayaan media, dan *emotional distress* memiliki pengaruh terhadap perilaku menghindari berita (*news avoidance*) generasi muda di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah di atas menghasilkan tiga pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Seberapa tinggi tingkat literasi politik generasi muda di Indonesia?
2. Seberapa tinggi perilaku menghindari berita (*news avoidance*) generasi muda di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh literasi politik, kepercayaan media, dan *emotional distress* terhadap perilaku menghindari berita (*news avoidance*) di kalangan generasi muda di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat literasi politik generasi muda di Indonesia.
2. Mengetahui tingkat perilaku menghindari berita (*news avoidance*) generasi muda di Indonesia.
3. Mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat literasi politik, kepercayaan media, dan *emotional distress* terhadap perilaku menghindari berita (*news avoidance*) di kalangan generasi muda Indonesia.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian media, khususnya dalam pembahasan perilaku *news avoidance* di tengah era digitalisasi saat ini. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam kajian mengenai literasi politik lantaran peneliti memiliki kesulitan dalam mencari literatur mengenai literasi politik di Indonesia. Penelitian ini menggambarkan pengaruh tingkat literasi politik terhadap perilaku *news avoidance*. Di saat yang bersamaan, kepercayaan media dan *emotional distress* juga

menjadi faktor dalam mengukur pengaruh antara keduanya. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya mengenai literasi politik di Indonesia dan perilaku *news avoidance*, khususnya dalam membahas faktor dan solusi permasalahan ini.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi media, institusi pendidikan, serta pemerintah dalam meningkatkan masyarakat yang terinformasi politik dengan menyajikan informasi-informasi akurat.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat dalam hal meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan literasi politik. Dengan begitu, masyarakat dapat menggunakan hak suaranya secara lebih berkualitas dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pertama berupa minimnya penelitian terhadulu mengenai literasi politik. Akibatnya, peneliti belum tentu menggunakan konsep maupun indikator untuk mengukur variabel secara tepat. Selain itu, penelitian ini hanya menjawab pertanyaan apakah literasi politik, kepercayaan media, dan *emotional distress* memiliki pengaruh terhadap perilaku *news avoidance*. Hasil penelitian tidak dapat menjawab alasan di balik keputusan audiens maupun solusi untuk mengatasi permasalahan ini.

Penelitian juga menggunakan populasi berupa Generasi Z di Indonesia. Kriteria populasi tanpa batasan geografis membuat peneliti menggunakan jenis *quota sampling* untuk memenuhi kebutuhan sampel yang diperlukan dalam penelitian ini. Namun, peneliti menemukan kesulitan dalam memenuhi

kuota sampel yang dibutuhkan hingga memaksa peneliti untuk juga menerapkan metode *snowball sampling* untuk memenuhi kuota sampel dalam penelitian ini. Padahal, jenis sampling ini tidak dapat memenuhi kriteria penyebaran wilayah di Indonesia secara merata. Metode *sampling* ini juga dinilai bias karena memanfaatkan relasi sosial responden sehingga memungkinkan hasil penelitian yang terlalu merepresentasikan populasi dengan kriteria dan sifat tertentu. Selain itu, peneliti juga tidak dapat memastikan responden mengisi kuesioner dengan jujur dan serius karena keterbatasan dalam metode pengumpulan data.

Setelah melakukan penelitian, hasil penelitian menunjukkan pengaruh antar variabel yang tergolong rendah. Hal ini membuat peneliti menyadari banyaknya keterbatasan penelitian dengan tidak menyertakan faktor-faktor lainnya yang mungkin memiliki pengaruh seperti partisipasi politik dan motivasi mencari berita.

